

SP 16/DHMS/OJK/IV/2022
43/SP/HM.01/02/POLHUKAM/4/2022

SIARAN PERS BERSAMA

OJK DAN KEMENKO POLHUKAM RI PERKUAT KERJA SAMA PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG SEKTOR JASA KEUANGAN

Jakarta, 6 April 2022. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam) menyepakati kerja sama penguatan koordinasi tugas, fungsi, dan kewenangan kedua lembaga yang diharapkan dapat mendorong sinergitas penegakan hukum di bidang sektor jasa keuangan.

Kesepakatan kerja sama dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Moh. Mahfud M.D. di Kantor OJK, Kompleks Bank Indonesia Jakarta, Rabu.

Wimboh menyampaikan kerja sama ini diharapkan bisa menutup celah hukum yang muncul sejalan dengan perkembangan produk dan layanan sektor jasa keuangan akibat cepatnya pertumbuhan teknologi informasi.

“OJK akan terus melakukan perlindungan konsumen walaupun dudukan hukum belum jelas. Makanya kita koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Wimboh.

Moh. Mahfud MD dalam kesempatan itu menyampaikan kesepakatan ini muncul karena adanya kepentingan yang sama antara OJK dan Kemenko Polhukam dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum serta perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

“Kita perkuat lagi langkah-langkah koordinasi yang tertuang dalam Nota Kesepahaman ini. Diperlukan adanya tindak lanjut perjanjian kerja sama yang lebih teknis agar dapat terbangun kemitraan yang strategis, tidak hanya dengan OJK, tetapi juga dengan penegak hukum dan lembaga/kementerian juga pemangku kepentingan lainnya,” ucap Mahfud.

Ruang lingkup kerja sama dan koordinasi yang disepakati antara lain meliputi:

- a. Kebijakan di bidang hukum terkait sektor jasa keuangan;
- b. Pengelolaan dan penanganan isu di bidang hukum terkait sektor jasa keuangan;
- c. Dukungan dalam rangka penyusunan regulasi dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan;
- d. Penyediaan narasumber dan/atau tenaga ahli;
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; dan
- f. Pertukaran data dan/atau informasi.

Nota kesepahaman ini merupakan bagian dari inisiatif strategis OJK terkait Peningkatan Komunikasi dalam Penegakan Hukum Permasalahan Sektor Jasa Keuangan (SJK), yang bertujuan untuk melakukan penguatan protokol antar lembaga agar tercapai sinergi dalam penanganan permasalahan hukum dan *enforcement* pada SJK.

OJK secara proaktif akan terus meningkatkan sinergitas dengan kementerian dan lembaga, termasuk aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan yang pada ujungnya untuk kepentingan perlindungan konsumen.

- Narahubung OJK:
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK - Anto Prabowo.
Email humas@ojk.go.id telepon 021.29600000.

- Narahubung Kemenko Polhukam RI:
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Humas Kemenko Polhukam RI - Sidiq Mustofa, S.E., M.M.
Email humas@polkam.go.id telepon 021.34830612